

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* Cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2017, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Sjaifurrachman dan Habib, 2011, *Aspek-Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Zaninudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anand, Ghansham, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Arliman, Laurensius, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Bandung
- Asnawi, Natsir, 2016, *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- BPHN, Tim Penerjemah, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S. Salim, 2006, *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichisar Baru Van Hove, Jakarta.

- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum Cetakan ke-1*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Marpaung, Faisal Ananda dan Warni, 2016, “Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Pertama”, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyoto. 2012. *Perjanjian teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*. Cakrawala Media: Yogyakarta.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 1986, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mustofa, 2014, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT Dilengkapi dengan UUPA, UUHT, UUBPHTB, Peraturan tentang Jabatan PPAT, PPh, Pendaftaran Tanah, Masa Berlaku SKMHT untuk Kredit-Kredit Tertentu, Laporan Bulanan PPAT, Blanko-Blanko Akta PPAT, dan Pendoman Pengisiannya, Contoh Akta PPAT Berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012*, Karya Media, Yogyakarta.
- Pramono, Widyono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Urip Santoso, 2001, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sitanggang, Victor M. Situmorang dan Cormentya, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta

Sugiyono, 2005, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Tobing, G.H.S Lumban, 2015, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 159/Pdt.G/2018/PN.Bpp

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 685/Pid.Sus/2019/PN.Bpp

C. Makalah, Jurnal, Tesis, Disertasi

Abdughani, Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari, 2021, “Tanggung Jawab Notaris / PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum”, *Juris and Society Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* Volume 1 Nomor 1 Juni 2021.

Abdulloh, 2011, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Adhawiyah, Robiatul dkk, 2017, “Analisis Hukum Kontrak Syariah Terhadap Transaksi Kepemilikan Rumah Dengan Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan di PT. Suci Griya Persada”, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* Volume 8, Nomor 2 Desember 2017.

Adonara, Firman Floranta, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Volume 12, Nomor 2 2015.

Anastasya, Claudia, 2018, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pengurusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang Berakibat Terjadinya Penggelapan Sertifikat Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN.GIN, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Agustina, Hurip dkk, 2016, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP”, *Jurnal Hukum De'rechsstaat* Volume 2 No 2 September 2016.

Azyati, Nur Ami, 2015, “Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Telah Dijatuhi Pidana dengan Ancaman Hukum Pidana Kurang dari Lima Tahun”, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*

Buko, Siska Harun, 2017, “Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”, *Lex Privatum* Volume V Nomor 1 Januari-Februari 2017.

- Butar-Butar, Abdi Azkhari, 2020, “Tinjauan Yuridis Pidana Penggelapan (Studi Putusan No.9/Pid.B/2016/PN. Medan), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 2 Nomor 2 2020.
- Chandrasesmi, Harumi, 2017, “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”, *Privat Law* Volume V Nomor 1, Universitas Sebelas Maret 2017.
- Ade Krisna Dwipayana, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Terbukti Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis* Universitas Gadjah Mada
- Fanani, Irsyam, 2016, “Peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris”, *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ghiffary, M. Maulana, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hakim, Intan Rif’atul, 2017, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Pacitan pada Tahun 2016”, *Skripsi* IAIN Ponorogo 2017.
- Harum, Fadilah Sri Elvianita, 2017, “Implementasi Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penggelapan Melalui Mekanisme Keperdataan”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta.
- Hendra Rahmad, 2012, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012.
- Herawati, Anita Putri, 2019, “Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik”, *Tesis* Universitas Islam Indonesia.
- Kinanti, Adisti, 2016, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Diponegoro Law Journal* Volume 5 Nomor 3 2016

- Loho, Andreas C.A., 2019, “Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *Lex Crimen* Volume III Nomor 12 Desember 2019.
- M. Kholiduzen, 2011, “Metode Penelitian Deskriptif,” *Etheses*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat dkk, 2018, “Prinsip Kehati – Hatian dalam Membuat Akta Autentik, *Acta Comitatus* Volume 2 April 2018
- Mardiyah, 2017, “Sanksi Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Acta Comitatus Jurnal Imiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana* Volume 1 2017.
- Massie, Mahendri, 2017, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, *Lex Crimen* Volume VI Nomor 7 bulan September 2017.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, 2012, “Perkembangan Metodologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1 Nomor 2 2012.
- Novita, Cici Fajar, 2014, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta PPAT (Wilayah Kecamatan Tinombo), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 3 Volume 2 2014.
- Perdana, Surya dkk, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2020.
- Permana, Yudi Setia dkk, 2017, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Perikatan Jual Beli Bertahap”, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS* Volume V Nomor 3 Desember 2017.
- Prastowo, RB. Budi, 2006, “Delik Formil / Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil / Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, *Jurnal Hukum Pro Justicia* Juli 2006 Volume 24 Nomor 3 2006.
- Prawira, I Gusti Bagus Yoga, 2016, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS* Volume IV Nomor 1 April 2016.

- Prayogo, Sedyo, 2016, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III Nomor 2 2016.
- Rahmawati, Luvi, 2018, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notariil Dengan Kuasa Menjual Kepada Investor Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Saputra, Imam Surya dkk, 2020, “Akibat Hukum Adanya Penyalahgunaan Keadaan Pada Perjanjian Jual Beli Tanah di Banda Aceh”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 Issue 2 Agustus 2020.
- Sari, Devi Nurmala, 2017, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Titipan Uang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Dilakukan oleh Notaris – PPAT”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.
- Sari, I Gusti Agung Dhenita dkk, 2018, “Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana 2018.
- Simamora, Janpatar, 2014, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum* Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman Volume 14 Nomor 3 Tahun 2014.
- Siregar, Sepuh Ade Irsyam, 2019, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Mediasi Penal Sebagai Implementasi *Restorative Justice* Di Kepolisian Resor Sleman”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Situmorang, Samson Aprinaldi, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Berdasarkan Dokumen dan Keterangan Palsu”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sundah, Pingkan, 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014”, *Lex et Societatis* Volume II Nomor 4 Mei 2014.
- Supa’at, Muharani 2018, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati (Studi Kasus Nomor

BP/05/VII/2017/Reskrim)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 13
Nomor 1 Maret 2018

Yanti, Riska, 2013, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak
Pidana Penggelapan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*
Edisi 5 Volume 1 2013.